



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Senin, 11 September 2017

Tunggu Sprinlid Kajati, Proyek Penangkaran Bibit Kerbau Diusut

Ambon - Kendati sudah menemukan proyek penangkaran bibit kerbau unggulan milik Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku tahun 2013 di Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bermasalah, namun pengusutannya masih menunggu Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) dari Kajati Maluku, Manumpak Pane.

Sprinlid belum juga dikeluarkan oleh Kajati, padahal tim Kejati Maluku dan Cabang Kejari Maluku Tenggara di Wonreli sudah melakukan *on the spot* ke lokasi proyek pada awal Agustus 2017 lalu, dan menemukan proyek senilai Rp 3 miliar itu, bermasalah.

"Belum. Belum diterbitkan Sprinlidnya," kata Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Sabtu (9/9).

Sapulette mengakui, penanganan kasus ini sudah dialihkan ke Kejati Maluku, namun untuk tindaklanjutnya masih menunggu petunjuk Kajati.

"Awalnya setelah ditelaah kemudian laporan tersebut diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh Cabjari Wonreli dengan pertimbangan locus delictinya di MBD guna efektivitas dan efisiensi penanganan laporan, namun setelah Cabjari Wonreli mempelajari dan melakukan pengecekan awal, ternyata para pihak yang terkait dengan masalah yang dilaporkan lebih banyak berdomisili di Ambon. Jadi penanganannya menunggu petunjuk pimpinan," jelasnya.

Bermasalah

Sebelumnya diberitakan, tim Kejati Maluku bersama Cabang Kejari Maluku Tenggara di Wonreli menemukan proyek penangkaran bibit kerbau unggulan milik Distan Provinsi Maluku tahun 2013 di Desa Klis, Kabupaten MBD bermasalah.

Hal tersebut ditemukan saat tim gabungan melakukan *on the spot* ke lokasi proyek pada awal Agustus 2017 lalu. "Ketika dilakukan *on the spot* kita temukan proyek tersebut bermasalah sehingga harus diusut," tandas Kepala Cabang Kejari Maluku Tenggara di Wonreli, Hendrik Sikteubun, kepada *Siwalima*, di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (8/9). Menurut Sikteubun, proyek tersebut bermasalah karena anggaran yang dicairkan tidak sesuai dengan RAB yang ditetapkan. "Anggaran telah dicairkan 100 persen tetapi tidak sesuai dengan RAB, itu artinya proyek tersebut bermasalah," ujarnya.

Sikteubun menambahkan, penanganan kasus ini telah diambil alih oleh Kejati Maluku. Ia hanya ikut membantu untuk melakukan *on the spot* pada awal Agustus itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi proyek penangkaran bibit kerbau unggulan milik Distan Maluku tahun 2013 di Desa Klis, Kabupaten MBD mandek di kejaksaan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Proyek senilai Rp 3.000.000.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku itu, sudah didisposisikan oleh bagian intel Kejati Maluku kepada Cabang Kejari Maluku Tenggara di Wonreli yang dipimpin Hendrik Sikteubun. Tetapi proses hukum tak jalan.

Karena itu, masyarakat meminta Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan ketidakberesan dalam proyek itu.

Dalam laporan itu, masyarakat Desa Klis membeberkan sejumlah masalah yang diduga kuat terjadi tindak pidana korupsi karena pekerjaan tidak sesuai dengan RAB yang ditentukan dalam kontrak.

Masalah tersebut adalah dalam kontrak tiang pagar harus menggunakan pipa besi, tetapi yang digunakan adalah kayu. Pagar juga harus menggunakan teralis besi, tetapi yang digunakan kawat duri. Kemudian, luas tempat penangkaran tersebut juga tidak sesuai RAB atau dibuat kecil. Lebih parah lagi, tempat penangkaran itu sudah rusak sehingga tidak dapat difungsikan.

Masalah lain adalah, tidak adanya CCO atau revisi kontrak terhadap pekerjaan tersebut. Diduga telah merugikan negara miliaran rupiah.

Masyarakat Desa Klis pernah menanyakan Distan Maluku tentang pekerjaan yang bermasalah ini, namun PPK selalu menghindar. "Karena menghindar, sehingga tidak ada jawaban menambah kecurigaan kami terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut," tegas warga Desa Klis dalam laporan itu.

Karena itu, mereka meminta Kajati Maluku untuk merespon laporan masyarakat dan membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut. "Kami percaya bahwa lembaga penegakan hukum khususnya Kejati Maluku selama ini dipercaya masyarakat Maluku. Untuk itu dengan adanya investigasi dari Kejati Maluku maka akan kami dapatkan keadilan yang sesungguhnya," tegasnya lagi.

Distan Bantah

Dinas Pertanian Provinsi Maluku mengklaim laporan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi proyek penangkaran bibit kerbau unggulan di Desa Klis tidaklah benar.

Menurut PPTK Peternakan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku, Sugeng tidak ada proyek penangkaran bibit kerbau unggulan di Desa Klis tahun 2013. Yang ada hanya proyek pembangunan pagar keliling di tahun 2012.

Proyek yang bersumber dari APBD itu, merupakan aspirasi dari mantan Anggota DPRD Maluku Dapil MBD almarhum Arnolis Laipeni. "Itu merupakan proyek tahun 2012 bersumber dari APBD dan merupakan aspirasi almarhum Arnoles Laipeni," jelas Sugeng kepada *Siwalima* di ruang kerjanya, Senin (28/8).

Sesuai dengan kontrak, yang dikerjakan adalah pembangunan pagar keliling di Desa Klis seluas 2 hektar dengan konstruksi beton dengan anggaran Rp 297 juta. "Ini untuk pekerjaan pembangunan pagar, tidak benar seperti yang disampaikan. Pagarnya itu



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

terbuat dari beton dengan kawat lahannya 2 hektar. Ada lengkap dengan buktinya. Foto-foto dokumentasi pun sangat lengkap,” tegasnya. **(S-27)**

http://www.siwalimanews.com/post/tunggu_sprinlid_kajati_proyek_penangkaran_bibit_kerbau_diusut